

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman fatoni, (2011), Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Sunggono, (2002), Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, (2002), Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta
- Friedman, L. M. (2019), Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia.
- Hamzah, Andi. (2000), Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyelesaian KUHAP dan KUHP Baru. Grafindo. Jakarta
- Kasmanto Rinaldi, S. H. (2021), Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasarakatan, Cendikia Mulia Mandiri
- Marzuki, P. M. (2013), Penelitian hukum. Jakarta : Kencana
- Moeljatno, (2008), Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta
- Priyatno, Dwidja. (2006), Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung. Refika Aditama
- Ruba'i, M. (2021), Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Samosir, D. (2016), Penologi dan pemasarakatan, Nuansa Aulia
- Soekanto, S. (1988), Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV. Ramadja Karya
- Waluyo, B. (2023), Sistem pemasarakatan di Indonesia, Sinar Grafika
- Zainuddin Ali. (2013), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

B. JURNAL

- Aan Riana A.A.P., (2013), Ningrum P.S., “Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen”, *Recidive*, Vol. 2, No. 3
- Asmawati, H. (2022), Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang), *Journal Evidence of Law*, 1(1), 112-124.
- Farida Sekti P., (2022), “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman”, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022
- Fauzi, W.A. (2021), Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum
- Kurnia, R.A. (2018), Pencabutan Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri)
- Ni Made L.D., I Putu A.S., (2020), “Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem”, *KERTA DYATMIKA: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, Vol. 17, No. 2
- Rolando Fernando V.B., (2020), “Kualitas Pelayanan Kunjungan Berbasis Sistem Database Permasyarakatan”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 3
- Sirait, D. S., dkk (2022), Penegakan Hukum Terhadap Klien Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Kembali, *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 410-420.
- Siregar, N. F. (2018), Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16
- Siti Ngatiqoh, (2020), “Implementasi Pelayanan Kunjungan Berbasis Information Technology (IT) di Lapas Perempuan Kelas II A Denpasar”, *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 9, No. 1
- Sobirin, S. (2022), Pelaksanaan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika, *Jurnal Juristic*

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6341)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembimbingan dan Pengawasan Klien Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352)

D. LAIN-LAIN

Balai Pemasarakatan Kelas I A Bandung, “Pencabutan Pembebasan Bersyarat”, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8114442/balai-pemasarakatan-kelas-i-bandung/pencabutan-pembebasan-bersyarat> , diakses pada 30 Agustus 2024

Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas> , diakses pada tanggal 7 Februari 2024, WIB

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8111044/kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia/pencabutan-pembebasan-bersyarat> , diakses pada tanggal 25 Februari 2024

Pemasyarakatan Era VUCA <https://kolom.solopos.com/pemasyarakatan-era-vuca-1869094> , diakses pada tanggal 10 Agustus 2024

Wawancara dengan staf pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, 8 Januari 2024, pukul 10:00 WIB

Wawancara dengan staf pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, 27 Mei 2024, pukul 09:00 WIB